

## **Pendampingan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terkait Aset Tak Berwujud di BPPKAD Kabupaten Probolinggo**

**Dimas Nasrullah Arif<sup>1</sup>, Moh Nurhedi<sup>2</sup>, Muhammad Ridwan<sup>3</sup>**  
*<sup>1,2,3</sup> Universitas Nurul Jadid, Indonesia*

Received : 21 Oktober 2025, Revised : 29 Oktober 2025, Published : 8 November 2025

### **Corresponding Author**

**Nama Penulis:** Dimas Nasrullah Arif

E-mail: [dimaskropokayem15@gmail.com](mailto:dimaskropokayem15@gmail.com)

### **Abstrak**

*Kegiatan pendampingan ini bertujuan untuk membantu BPPKAD Kabupaten Probolinggo dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak berwujud. Melalui kegiatan pelatihan, diskusi, dan bimbingan teknis, aparatur BPPKAD diberikan pemahaman mengenai pengakuan, pengukuran, serta pelaporan aset tak berwujud sesuai ketentuan SAP. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam mengelola data aset tak berwujud secara lebih akurat dan sesuai standar. Pendampingan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.*

**Kata Kunci** - Standar Akuntansi Pemerintahan, Aset Tak Berwujud, BPPKAD, Pendampingan, Laporan Keuangan Daerah

### **Abstract**

*This mentoring activity aims to assist the Regional Financial and Asset Management Agency (BPPKAD) of Probolinggo Regency in implementing the Government Accounting Standards (SAP) related to intangible assets. Through training sessions, discussions, and technical guidance, BPPKAD officials were provided with an understanding of the recognition, measurement, and reporting of intangible assets in accordance with SAP regulations. The results of the activity indicate an improvement in the knowledge and skills of the staff in managing intangible asset data more accurately and in compliance with the standards. This assistance is expected to enhance the quality of regional financial reports and support transparency and accountability in local government financial management.*

**Keywords** - Government Accounting Standards, Intangible Assets, BPPKAD, Assistance, Regional Financial Reports

**How To Cite** : Arif, D. N., Nurhedi, M., & Ridwan, M. (2025). Pendampingan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Terkait Aset Tak Berwujud di BPPKAD Kabupaten Probolinggo. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka*, 4(2), 1540 - 1545. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v4i2.643>

**Copyright** ©2025 Dimas Nasrullah Arif, Moh Nurhedi, Muhammad Ridwan

## **PENDAHULUAN**

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel (Vidyasari & Suryono, 2021). Salah satu komponen yang diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah aset tak berwujud. Aset ini memiliki karakteristik unik karena tidak memiliki bentuk fisik namun memberikan manfaat ekonomi atau jasa di masa mendatang (Sahgal, 2024). Contoh aset tak berwujud di sektor publik antara lain perangkat lunak, hak cipta, lisensi, dan dokumen hukum tertentu. Namun, dalam praktiknya, pengakuan dan pengukuran aset tak berwujud seringkali menimbulkan tantangan karena sulit untuk diidentifikasi dan diukur secara akurat (Wulandari et al., 2024).

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendapatan, keuangan, dan aset daerah menghadapi berbagai kendala dalam mengelola aset tak berwujud (Lailatul Fitria & Mubaroq, 2021). Petugas di lapangan kerap mengalami kesulitan dalam membedakan antara aset berwujud dan aset tak berwujud. Misalnya, masih terdapat kesalahpahaman bahwa barang fisik seperti lemari dapat dikategorikan sebagai aset tak berwujud, padahal menurut ketentuan SAP, lemari termasuk dalam aset tetap berwujud (Kotler (2012:284), 2020). Kesalahpahaman seperti ini dapat menyebabkan kesalahan pencatatan yang tidak sesuai standar, sehingga berdampak pada akurasi laporan keuangan pemerintah daerah (Utari et al., 2020).

Selain permasalahan klasifikasi, tantangan lain yang dihadapi adalah keterbatasan pengetahuan teknis pegawai mengenai cara mengukur nilai aset tak berwujud dan bagaimana mengakuinya sesuai standar akuntansi (Rosdiana & Viska Anggraita, 2024). Banyak pegawai yang belum memahami metode penilaian yang dapat digunakan untuk menentukan nilai wajar, sehingga terjadi perbedaan dalam praktik pencatatan. Hal ini pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan yang mungkin belum sepenuhnya mencerminkan kondisi keuangan sebenarnya dari pemerintah daerah (Supratno et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, pendampingan dalam penerapan SAP terkait aset tak berwujud menjadi hal yang sangat penting. Program ini dirancang sebagai kontribusi akademik untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas sekaligus panduan praktis bagi pegawai dalam penyusunan laporan keuangan (Sukma sari, 2024). Pendekatan yang digunakan tidak hanya berfokus pada penjelasan teoritis, tetapi juga mencakup simulasi praktis dan bimbingan teknis yang memungkinkan pegawai untuk secara langsung memperbaiki kesalahan pencatatan, seperti kekeliruan dalam mengklasifikasikan aset berwujud sebagai aset tak berwujud. Melalui pendampingan ini, diharapkan pegawai BPPKAD Kabupaten Probolinggo dapat meningkatkan kapasitas dalam mengelola aset sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, sehingga mampu meningkatkan kualitas, transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah (Supratno et al., 2021).

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam program pendampingan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak berwujud di BPPKAD Kabupaten Probolinggo disusun secara sistematis untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh para pejabat dalam proses pencatatan dan pelaporan. Tahapan kegiatan meliputi kegiatan sebelum pelaksanaan, saat pelaksanaan, dan setelah pelaksanaan, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara utuh dan berkelanjutan.

### **1. Sebelum program**

Pada tahap awal, dilakukan identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara singkat dengan pejabat BPPKAD. Hasilnya menunjukkan bahwa masih terdapat kesulitan dalam memahami definisi aset tak berwujud, membedakannya dengan aset berwujud, serta dalam menerapkan metode pengakuan dan pengukurannya.

Selanjutnya, dilakukan penyusunan materi pelatihan yang mencakup kajian teoritis mengenai SAP, studi kasus aset tak berwujud di sektor publik, serta penyusunan modul pelatihan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan BPPKAD. Koordinasi juga dilakukan dengan pihak BPPKAD untuk menentukan jadwal, tempat, dan peserta yang akan terlibat dalam kegiatan.

### **2. Selama program**

Kegiatan inti dilaksanakan dalam bentuk pendampingan langsung dengan menggabungkan pendekatan teoritis dan praktis. Pada bagian teoritis, fasilitator memberikan penjelasan mengenai konsep dasar SAP, khususnya tentang pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset tak berwujud.

Sesi diskusi interaktif kemudian dilakukan untuk menggali pemahaman peserta, termasuk menyoroti kesalahan umum seperti pengelompokan barang berwujud (misalnya lemari) sebagai aset tak berwujud.

Pada bagian praktis, peserta dibimbing untuk melakukan simulasi akuntansi terkait aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan SAP. Simulasi tersebut mencakup proses identifikasi aset, penilaian nilai wajar, dan pengakuan dalam laporan keuangan. Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk mengerjakan studi kasus, kemudian hasilnya dipresentasikan dan dievaluasi bersama. Pendekatan ini memastikan setiap peserta benar-benar memahami perbedaan dan perlakuan akuntansi terhadap aset tak berwujud.

### 3. Setelah program

Tahap tindak lanjut dilakukan dengan mengevaluasi hasil pencatatan dan simulasi yang dilakukan oleh peserta. Evaluasi meliputi pemahaman peserta terhadap materi, keterampilan praktis, serta perubahan pola pikir dalam membedakan aset berwujud dan tak berwujud. Selain itu, tim pendamping memberikan rekomendasi kepada BPPKAD untuk memperbarui pedoman pencatatan aset, menyusun panduan internal yang lebih sederhana, serta melaksanakan pelatihan berkelanjutan guna menjaga pemahaman terhadap SAP.

Kegiatan tindak lanjut lainnya dilakukan melalui pemantauan informal, seperti komunikasi dengan BPPKAD melalui laporan singkat atau diskusi terbatas setelah program selesai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hasil pendampingan dapat diterapkan secara konsisten dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga kualitas laporan semakin baik dan sesuai dengan standar yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil**

Program pendampingan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak berwujud di BPPKAD Kabupaten Probolinggo menghasilkan beberapa capaian penting dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian besar peserta masih mengalami kesulitan dalam membedakan antara aset berwujud dan aset tak berwujud, yang seringkali menyebabkan kesalahan klasifikasi, seperti mengelompokkan barang berwujud seperti lemari sebagai aset tak berwujud. Setelah melalui tahapan pendampingan, peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman mereka (Sukmaningrum, 2023).

Peserta menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi jenis-jenis aset tak berwujud yang relevan dengan pemerintah daerah, seperti perangkat lunak, hak cipta, lisensi, dan dokumen hukum tertentu (Adhitya, 2023). Selain itu, mereka juga mampu melakukan pengukuran dan pencatatan sesuai dengan ketentuan SAP. Kemajuan ini terlihat dari hasil simulasi akuntansi yang dilakukan selama program, di mana sebagian besar peserta berhasil menyusun jurnal sesuai dengan prinsip akuntansi pemerintahan (Adhitya, 2023).

Selain peningkatan keterampilan teknis, terjadi pula perubahan pola pikir peserta terhadap pentingnya pengelolaan aset tak berwujud. Sebelumnya, kegiatan pencatatan sering dipandang hanya sebagai rutinitas administratif. Namun setelah mengikuti program, peserta memperoleh pemahaman yang lebih mendalam bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai standar memiliki peran strategis sebagai instrumen akuntabilitas publik. Kesadaran ini mendorong para aparatur untuk lebih teliti, cermat, dan konsisten dalam proses pencatatan (Pidana et al., 2024).

Capaian penting lainnya adalah meningkatnya keterbukaan peserta dalam membahas permasalahan nyata yang mereka hadapi di lingkungan kerja, seperti keterbatasan data pendukung, kesulitan dalam menentukan nilai wajar aset, dan belum optimalnya sistem informasi yang terintegrasi. Melalui program pendampingan, permasalahan tersebut diatasi dengan solusi praktis, seperti penggunaan metode penilaian alternatif dan peningkatan koordinasi antarbagian (Saputra et al., 2025).

Secara keseluruhan, hasil program menunjukkan bahwa pendampingan ini berhasil meningkatkan kapasitas aparatur BPPKAD dalam mengelola aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan SAP. Peningkatan ini tidak hanya berdampak pada kualitas laporan keuangan daerah, tetapi juga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel (Darmawati et al., 2024).

### **B. PEMBAHASAN**

Hasil dari program pendampingan menunjukkan bahwa pemahaman aparatur BPPKAD

Kabupaten Probolinggo mengenai aset tak berwujud meningkat secara signifikan setelah pelaksanaan program. Hal ini membuktikan bahwa metode pendampingan yang dilakukan, melalui kombinasi penyampaian materi, pelatihan teknis, simulasi akuntansi, dan konsultasi praktis, mampu memberikan dampak nyata. Diskusi interaktif memungkinkan peserta tidak hanya menerima pengetahuan secara pasif, tetapi juga mengaitkannya dengan permasalahan riil yang mereka hadapi dalam pekerjaan sehari-hari (Difa Aulia Salsa Bella Islami et al., 2023).

Sebelum program dilaksanakan, banyak aparatur yang masih bingung dalam membedakan antara aset berwujud dan aset tak berwujud. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan yang dapat menurunkan kualitas laporan keuangan daerah. Misalnya, terdapat kecenderungan untuk mengklasifikasikan barang fisik seperti lemari sebagai aset tak berwujud akibat kurangnya pemahaman mendalam. Setelah adanya pendampingan, kesalahan seperti ini berhasil diminimalkan karena para aparatur telah memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang klasifikasi aset sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (Suryani, 2021).



**Gambar 1.** Pelaksanaan Aset Tak Berwujud

Selain itu, kegiatan ini menekankan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak berwujud tidak hanya berfokus pada aspek teknis pencatatan, tetapi juga pada kesadaran aparatur terhadap fungsi strategis laporan keuangan. Perubahan pola pikir dari sekadar memandang laporan keuangan sebagai dokumen administratif menjadi instrumen akuntabilitas publik menunjukkan bahwa kegiatan ini berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih kuat. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, aparatur diharapkan dapat lebih konsisten dalam menjaga kualitas laporan keuangan, sehingga mampu meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah (Nasution et al., 2024).

Pembahasan juga menyoroti beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan data pendukung, kesulitan dalam penilaian nilai wajar aset, serta belum tersedianya sistem informasi yang sepenuhnya terintegrasi. Namun, melalui bimbingan teknis dan konsultasi, diperoleh solusi sementara, misalnya dengan penerapan metode penilaian alternatif atau penguatan koordinasi antarbagian untuk melengkapi data yang dibutuhkan (Terapan et al., 2024). Dengan demikian, program pendampingan ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek dalam peningkatan keterampilan, tetapi juga membuka jalan bagi pengembangan sistem yang lebih baik di masa mendatang (Frimansyah, 2025).

Secara lebih luas, kegiatan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara kalangan akademisi dan pemerintah daerah sangat penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan. Hasil positif dari program ini berpotensi untuk diterapkan di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa (Handini et al., 2025). Oleh karena itu, pendampingan dalam penerapan SAP, khususnya terkait aset tak berwujud, dapat menjadi model sinergi antara dunia akademik dan praktik pemerintahan dalam mewujudkan laporan keuangan daerah yang lebih andal (Supratno et al., 2021).

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kegiatan pendampingan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak berwujud di BPPKAD Kabupaten Probolinggo telah berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur dalam mengelola serta melaporkan aset tak berwujud sesuai dengan ketentuan SAP. Melalui pelatihan, simulasi, dan bimbingan teknis, aparatur mampu membedakan antara aset berwujud dan tidak berwujud, serta menyusun laporan keuangan yang lebih akurat dan akuntabel. Selain peningkatan kemampuan teknis, kegiatan ini juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya laporan keuangan sebagai instrumen akuntabilitas publik.

Agar hasil pendampingan ini berkelanjutan, disarankan agar kegiatan serupa terus dilaksanakan secara rutin dan terstruktur. BPPKAD perlu memperkuat sistem informasi akuntansi yang terintegrasi serta meningkatkan koordinasi antarbidang untuk mendukung pencatatan aset tak berwujud secara optimal. Kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga akademik juga perlu dipertahankan guna memastikan penerapan SAP berjalan sesuai standar dan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada BPPKAD Kabupaten Probolinggo atas dukungan dan kerja samanya dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terkait aset tak berwujud. Terima kasih juga kepada seluruh aparaturnya yang telah berpartisipasi aktif serta kepada pihak perguruan tinggi dan tim pelaksana atas bimbingan dan kontribusinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, A. (2023). Manajemen Aset Dan Strategi Pemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta Sebagai Aset Tak Berwujud). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2(1). <https://doi.org/10.21143/telj.vol2.no1.1039>
- Darmawati, D., Kusumawati, A., Syamsuddin, S., Indrijawati, A., & Juanda, I. S. K. (2024). Pendampingan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam Upaya Menciptakan Laporan Keuangan Berkualitas di Kabupaten Pinrang. *Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(4), 858–867. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i4.5006>
- Difa Aulia Salsa Bella Islami, Maulidyah Amalina Rizqi, & Nur Cahyadi. (2023). Efektivitas Program Pelatihan Dalam Meningkatkan Kinerja Pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik. *CEMERLANG: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis*, 3(4), 114–127. <https://doi.org/10.55606/cemerlang.v3i4.1881>
- Frimansyah, A. (2025). Jurnal Desentralisasi Fiskal, Ekonomi, dan Keuangan Daerah Transformasi Pengelolaan Aset Daerah: Penguatan Pengendalian Internal dan Integrasi Teknologi untuk Optimalisasi BMD. *Jurnal Devis*, 5(December 2024).
- Handini, N., Mely Darwina, Yudistira, & Wahjoe Pangestoeti. (2025). Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Lokal Melalui Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964–986. <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jjnu/article/view/5793>
- Kotler (2012:284). (2020). Bab ii kajian pustaka bab ii kajian pustaka 2.1. *Bab II Kajian Pustaka 2.1*, 12(2004), 6–25.
- Lailatul Fitria, N. J., & Mubaroq, H. (2021). Strategi pengelolaan asset daerah Kota Probolinggo (Studi kasus: Plaza Probolinggo menjadi asset Pemerintah Kota Probolinggo). *Gulawentah: Jurnal Studi Sosial*, 6(2), 176. <https://doi.org/10.25273/gulawentah.v6i2.10888>
- Nasution, P. W., Wulandari, T., Nasirwan, Suhandi, & Hasanah, N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua Terhadap laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 1(1), 26–32.
- Pidana, P., Pelaku, T., Perspektif, D., Restoratif, K., & Mulyani, Y. S. R. I. (2024). *Program Pascasarjana Program Pascasarjana*. 2, 777322.
- Rosdiana, N. S. M., & Viska Anggraita. (2024). Proses Pengakuan Dan Pengukuran Aset Tak Berwujud Data Dan Informasi Geospasial: Kelemahan Dan Kendala. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 11(1), 67–94. <https://doi.org/10.25105/jat.v11i1.18709>
- Sahgal, A. (2024). Опыт аудита обеспечения качества и безопасности медицинской деятельности в медицинской организации по разделу «Эпидемиологическая безопасность» No Title. *Вестник Росздравнадзора*, 4(1), 9–15.
- Saputra, T., Bahri, S., & Azwar, B. (2025). *Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia di Yayasan Generasi Rabbani Muara Enim*. <http://e-theses.iaincurup.ac.id/8859/>
- Sukma sari, I. (2024). *Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Dalam Penyajian Laporan Keuangan Oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Medan*. 83.

- Sukmaningrum, I. (2023). *Dalam Pelayanan Di Kantor Badan Pengelolaan*. [https://repository.unissula.ac.id/32724/1/Manajemen\\_30401900149\\_fullpdf.pdf](https://repository.unissula.ac.id/32724/1/Manajemen_30401900149_fullpdf.pdf)
- Supratno, Y. H., Murtono, Mochamad, W., Tulak, T., Fatriyadi, R., Wardi, Y., Evanita, S., Yousif, N., Cole, J., Rothwell, J. C., Diedrichsen, J., Zelik, K. E., Winstein, C. J., Kay, D. B., Wijesinghe, R., Protti, D. A., Camp, A. J., Quinlan, E., Jacobs, J. V, ... Dublin, C. (2021). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. In *Journal of Physical Therapy Science* (Vol. 9, Nomor 1). <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Suryani, F. (2021). Pengaruh akuntabilitas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pelalawan. *Pengaruh akuntabilitas pegawai terhadap kualitas laporan keuangan pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah kabupaten pelalawan*, 1–150.
- Terapan, P. S., Stia, P., Jakarta, L. A. N., & Negara, L. A. (2024). *Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah ( Rpd ) Di Ditjen Bina Pembangunan Daerah : Studi Kasus Provinsi Bali Pembangunan Daerah ( Rpd ) Di Ditjen Bina Pembangunan Daerah : Studi Kasus*.
- Utari, R., Putri, J., & Harahap, R. (2020). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi dalam Meningkatkan Efisiensi Pelaporan Keuangan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara Fakultas Ekonomi Dan Bisnis , Program Studi Akuntansi , Universitas Muslim Nusantara Kabupaten Labuhanbatu Utara . Salah satunya a. 2(4)*.
- Vidyasari, F. N., & Suryono, B. (2021). "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah." *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(2).
- Wulandari, S., Fuad, F., & Suartini, S. (2024). Valuasi Aset Hak Kekayaan Intelektual Dalam Jaminan Fidusia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 543–554. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.972>